

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **1.1.Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan transparansi dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di Universitas Andalas belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan kurangnya keterbukaan informasi karena pembentukan PPID, pembuatan DIP, dan penyediaan sarana prasarana lainnya dilakukan hanya sebagai syarat untuk mendapatkan penghargaan. Tidak tersedianya peraturan mengenai SOP dan kurangnya sosialisasi serta pengawasan dari Rektor menggambarkan bahwa Rektor belum bersungguh-sungguh menjalankan Keterbukaan Informasi Publik di Unand, sehingga untuk memperoleh informasi di Unand masih sulit, terutama informasi mengenai alokasi dana. Masih terdapat upaya menutup-nutupi terkait informasi anggaran baik itu dalam hal pengumuman informasi maupun dalam hal masyarakat meminta informasi. Sehingga persoalan mengenai transparansi pengelolaan UKT, pengelolaan beasiswa, pengelolaan dana bus kampus, dan lain sebagainya belum terselesaikan dan terdapat indikasi adanya tindakan penyelewengan dalam kegiatan pengelolaan tersebut. Kemudian untuk memfasilitasi pelaporan, Unand hanya menyediakan informasi mengenai kontak universitas yang bisa dihubungi, namun tidak disertai dengan informasi mengenai tata cara pengaduan atas penyelewengan tindakan aparat publik dalam kegiatan melayani. Hal ini menggambarkan bahwa Unand belum bersungguh-sungguh untuk mewujudkan transparansi sebagaimana yang tertuang didalam visi misi Unand.

## 1.2.Saran

Berdasarkan simpulan yang ada, maka penulis memberikan saran baik dari segi akademis maupun segi praktis. Dari segi akademis, penelitian ini mengajarkan bahwa pembentukan lembaga pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan sistem yang kredibel, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan kesempatan penerapan transparansi pada Badan Publik. Hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan transparansi adalah ketersediaan informasi publik yang memadai melalui akses yang mudah dijangkau oleh publik sesuai dengan prinsip cepat, tepat, dan sederhana; menyediakan kesempatan berinteraksi antara masyarakat dengan pemerintah untuk menampung aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; serta adanya jaminan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan memperoleh informasi publik dengan mudah. Selain itu, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperhatikan faktor-faktor atau penyebab belum optimalnya penerapan transparansi Informasi Publik di sebuah Badan Publik dengan penggunaan teori yang lebih mendalam dan subjek yang lebih luas.

Dari segi praktis, penulis mengajukan sejumlah saran yang sebaiknya dilakukan oleh Universitas Andalas guna meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik, yaitu:

1. Pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi, mengingat bahwa pembentukan PPID sudah berlangsung sejak tahun 2015.
2. Integrasi *website* PPID dengan *website* utama Unand ([www.unand.ac.id](http://www.unand.ac.id))
3. Menganggarkan pembiayaan yang memadai bagi layanan informasi publik.
4. Peningkatan pemahaman dan komitmen pengelola sampai ke unit terkecil di instansi melalui sosialisasi sehingga tercipta pola kerja yang sinergis karena upaya yang tengah dilakukan guna mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan berkelanjutan, tidak hanya sebatas upaya untuk memperoleh penghargaan.
5. Penataan *database* yang lebih akurat dan *update* serta dikoordinasikan sampai unit terkecil dalam organisasi Unand.
6. Membentuk lembaga pengaduan dengan sistem yang kredibel sehingga mampu menciptakan partisipasi baik dari civitas akademika maupun masyarakat luas.
7. Sosialisasi terkait Keterbukaan Informasi Publik terutama PPID dilingkup internal, khususnya civitas akademika.